

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE RISK* DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP *TAX*
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI) TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

NOORMARITA

NIM : 16622182



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNG PINANG
2023**

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE RISK* DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP *TAX*
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI) TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**Nama : NOORMARITA
NIM : 16622182**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE RISK* DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP *TAX*
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
(BEI) TAHUN 2017-2021**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

Nama : NOORMARITA

NIM : 16622182

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Juhli Edi Simanjuntak, SE,MM,Ak,CA,CFra, CLI
NIDN. 1007057305 / Lektor

Novi Chandra Saputra, SE.,M.Ak.
NIDK. 8968410021/ Asisten Ahli

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE RISK* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2021

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : NOORMARITA

NIM : 16622182

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Sebelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

Juhli Edi Simanjuntak, SE,MM,Ak,CA,CFra, CLI
NIDN. 1007057305 / Lektor

Vanisa Meifari, S.E., M.Ak
NIDN. 1026059301/ Asisten Ahli

Anggota

Ranti Utami,S.E., M.Si.,Ak., CA
NIDN. 1004117701/ Lektor

Tanjungpinang, 11 Juli 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M. Ak., Ak. CA.
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Noormarita
NIM : 16622182
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.34
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Risk* dan
Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*
Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 11 Juli 2023
Penulis,

NOORMARITA
NIM. 16622182

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillah puji dan syukur penulis kepada Allah SWT karena rahmat dan pertolongan Nya, skripsi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dengan mengucapkan Allahumma Sholli ala Saidina Muhammad Waala Ali Muhammad.

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang tersayang yaitu Bapak dan Ibu yang doanya seluas langit, dimana pun saya berada, saya berteduh dibawah doanya.

Juga untuk Keluarga besar yang selalu menyemangati dan selalu merangkul saya dalam kondisi apapun.

Dan untuk teman-teman semua yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

HALAMAN MOTTO

“Hidup Tak Selamanya Manis Tapi Yakinlah Ketika Kita Mampu
Untuk Bertahan Kita Akan Menikmati Hasilnya Yang Manis”

(Noormarita)

“Jangan Mudah Menyerah”

(Noormarita)

"Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu."

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Risk* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021”**. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,M.Si.,Ak CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak, CAO selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Bapak Juhli Edi Simanjuntak, SE,MM,Ak,CA,CFra, CLI, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing, meluangkan waktu serta memberi masukan dan saran selama penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Novi Chandra Saputra, SE.,M.Ak. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing, meluangkan waktu serta memberi saran selama penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Untuk kedua orangtuaku yang sangat aku sayang yaitu Bapak Thamrin dan Ibu Rosnah yang sudah menjadi Orang Tua Terbaik untukku. Terima kasih atas kasih sayang, doa serta dedikasi dan didikannya sehingga aku tumbuh menjadi anak perempuan seperti yang kalian harapkan.
10. Untuk seluruh anggota keluarga yang tersayang.
11. Untuk teman-teman seangkatan yang senantiasa membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Untuk pihak-pihak yang terkait yang membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian berkali-kali lipat. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca.

Tanjungpinang, Juli 2023
Penulis,

NOORMARITA
NIM. 16622182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Kegunaan Penelitian	12
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	12
1.5.2 Kegunaan Praktis	12
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori.....	15
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	15
2.1.2 Profitabilitas	20
2.1.3 <i>Corporate Risk</i>	27

2.1.4	<i>Corporate Governance</i>	30
2.1.5	<i>Tax Avoidance</i>	42
2.2	Hubungan Antar Variabel.....	44
2.2.1	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.2.2	Pengaruh <i>Corporate Riks</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.2.3	Pengaruh Kepemilikan Instutusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	45
2.2.4	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidan.</i>	46
2.5.5	Pengaruh Profitabilitas, <i>Corporate Risk</i> , Kepemilikan Intitusional dan Komisaris Independen <i>Tax Avoidance</i>	47
2.3	Kerangka Pemikiran	48
2.4	Hipotesis	49
2.5	Penelitian Terdahulu	50

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	55
3.2	Jenis Data.....	55
3.3	Teknik Pengumpulan Data	56
3.4	Populasi dan Sampel.....	57
3.5	Definisi Operasional Variabel.....	60
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	73
4.1.1	Gambaran Umum dan Objek Penelitian	73
4.1.2	Profil Perusahaan.....	74
4.2	Hasil Penelitian Deskriptif	91
4.2.1	Analisis Deskriptif.....	91
4.2.2	Penyajian Data	93
4.3	Penentuan Model Data.....	101

4.3.1 Hasil Uji Asumi Klasik	103
4.3.2 Hasil Uji Multikolineritas	104
4.3.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	105
4.4 Hasil Uji Regresi.....	106
4.5 Hasil Uji Hipotesis.....	108
4.5.1 Hasil Uji Parsial.....	108
4.5.2 Hasil Uji Simultan	110
4.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	111
4.6 Pembahasan	112

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	4
Tabel 3.1	Jumlah Perusahaan Manufaktur BEI Sektor Industri BK	57
Tabel 3.2	Proses Penentuan Sampel.....	60
Tabel 3.3	Definisi Variabel.....	63
Tabel 4.1	Hasil Analisis Deskriptif	92
Tabel 4.2	Profitabilitas	94
Tabel 4.3	<i>Corporate Risk</i>	95
Tabel 4.4	Kepemilikan Institusional	97
Tabel 4.5	Komisaris Independen.....	98
Tabel 4.6	<i>Tax Avoidance</i>	100
Tabel 4.7	Penentuan Model	102
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Hausman	102
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas.....	103
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinieritas	104
Tabel 4.11	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	105
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Berganda	106
Tabel 4.13	Hasil Uji T.....	108
Tabel 4.14	Hasil Simultan F	109
Tabel 4.15	Hasil Koefisien Determinasi	111

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	49

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Rekapitulasi Data Penelitian
Lampiran 2	Laporan Keuangan Perusahaan
Lampiran 3	<i>Output Hasil Eviews</i>
Lampiran 4	Cek Plagiarism Turnitin

ABSTRAK

PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE RISK* DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2021

Noormarita. 16622182. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
noormarita1@gmail.com

Perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi suatu hal yang sejak dulu terus menjadi perhatian. Penghindaran pajak yang dilakukan merupakan bentuk respon pihak manajemen perusahaan dalam strategi penekanan pembayaran pajak yang masih dalam konteks legal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Corporate Risk* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor barang konsumsi. Namun dalam pemilihan sampel yang didapat hanya 22 perusahaan yang dinilai sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini.

Pengukuran pada penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi *E-views* versi 10 dalam pengolahan data. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya pengaruh dari Profitabilitas, *Corporate Risk* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

Kata Kunci : Profitabilitas, *Corporate Risk*, *Corporate Governance* dan *Tax Avoidance*

Dosen Pembimbing I : Juhli Edi Simanjuntak, SE,MM,Ak,CA,CFra, CLI
Dosen Pembimbing II : Novi Chandra Saputra, SE.,M.Ak.

ABSTRACT

The Effect of Profitability, Corporate Risk and Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed On the Stock Exchange Indonesia (IDX) 2017-2021

Noormarita. 16522182. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang
noormarita1@gmail.com

The company's behavior in carrying out tax avoidance has always been a concern. Tax evasion is a form of response from company management in a strategy to suppress tax payments which are still in a legal context.

This study aims to determine the effect of Profitability, Corporate Risk and Corporate Governance on Tax Avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021.

The population in this study amounted to 60 manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) in the consumer goods sector. However, in selecting the sample, only 22 companies were assessed according to the criteria in this study.

Measurements in this study used the help of the E-views application version 10 in data processing. based on the research results it is known that there is an influence from Profitability, Corporate Risk and Corporate Governance on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021.

Key Words : *Profitability, Corporate Risk, Corporate Governance and Tax Avoidance*

Dosen Pembimbing I : Juhli Edi Simanjuntak, SE,MM,Ak,CA,CFra, CLI

Dosen Pembimbing II : Novi Chandra Saputra, SE.,M.Ak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sebuah Negara memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Umumnya sebuah Negara akan menggunakan dana dari hasil pajak untuk membangun Negara baik untuk infrastruktur maupun pendanaan lainnya. Negara Indonesia menjadi salah satu Negara yang menerapkan pajak untuk membangun Negara, sehingga kewajiban membayar pajak menjadi hal utama untuk bagi rakyat Indonesia guna meningkatkan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara. Penerimaan sektor pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan yang potensial, 83,6% total pendapatan Negara Indonesia didapatkan dari sektor pajak setiap tahunnya. Dari tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan beberapa macam kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak antara lain dengan membuat aturan baru mengenai perpajakan maupun merevisi undang-undang perpajakan (Saputra A.D, 2018). Pajak menjadi bagian terpenting sehingga menjadi perhatian terutama di Negara Indonesia. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk pemerintahan yang digunakan dalam rangka membiayai pengeluaran serta sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang ekonomi dan bidang sosial. Pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan suatu Negara. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa pajak

merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan.

Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa industri manufaktur di Indonesia ternyata memiliki kemampuan untuk lebih produktif serta memberikan efek berantai secara luas. Dengan begini, peningkatan nilai tambah bahan baku, pertambahan jumlah tenaga kerja, serta tingginya devisa negara dengan mencatatkan pajak dan bea cukai terbesar pun akan terjadi. Hal ini juga didasarkan pada kemampuan beberapa sektor di industri ini yang mempunyai angka persentase kinerja di atas Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional, di antaranya adalah industri logam sebesar 9,94 %, industri tekstil dan pakaian dengan angka 7,53 %, serta industri alat angkutan sebesar 6,33 %. Terjadinya perkembangan industri manufaktur di Indonesia disebabkan oleh adanya metode hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Menurut Ayu, et al. (2017), pajak merupakan kewajiban secara financial yang dikenakan oleh Negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pembangunan publik. Adapun objek yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Penghasilan itu sendiri didefinisikan sebagai tambahan dalam hal ekonomis yang diperoleh didalam wilayah Indonesia bahkan diluar wilayah Indonesia yang digunakan untuk penambahan kekayaan Negara. Penerimaan dari pajak merupakan sumber yang penting untuk berbagai pengeluaran Negara sehingga seluruh wajib pajak baik perseorangan ataupun badan diharapkan dapat menjalankan kewajibanya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dengan sukarela.

Indonesia dapat dikategorikan sebagai Negara yang memiliki *tax ratio* yang rendah. Dari *tax ratio* dapat dijadikan salah satu indikator dasar kinerja otoritas pajak yang banyak digunakan. Pada tahun 2017, *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 10,7%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 11,5%, pada tahun 2019 *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 11,10% dan ditahun 2020 *tax ratio* Indonesia sebesar 11,57%, *tax ratio* ini masih dibawah rata-rata *tax ratio* negara *lower middle income countries* yang mencapai 17,7% (Misbakhun, 2018). Berdasarkan data dari *Heritage Foundation* Amerika Serikat, *tax ratio* Indonesia saat ini juga masih lebih rendah dari beberapa negara di Asia Tenggara seperti negara Malaysia nilai *tax ratio* nya 15,5%, Thailand 17%, Filipina 14,4%, dan negara Vietnam 13,8%, namun Indonesia sedikit diatas Kamboja 8% serta negara yang terendah yaitu Myanmar yang hanya sebesar 4,9% (Kementrian Keuangan RI, 2018). Rendahnya *tax ratio* Indonesia dibanding dengan beberapa negara Asia Tenggara mengindikasikan belum adanya pengoptimalan penerimaan pajak demi mempercepat proses pembangunan nasional.

Penerimaan pajak di awal tahun 2020 mengalami penurunan, Kementrian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada Januari 2020 hanya Rp 80,2 Triliun. Menurut perusahaan, pajak merupakan salah satu bagian penting dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi laba bersih dari perusahaan. Dari pengertian diatas, dapat diartikan pula bahwa pemerintah mengharapkan masyarakat melaksanakan kewajibanya dalam kepatuhan wajib pajak dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Indonesia. Namun, dari pandangan sektor bisnis perusahaan sebagai wajib pajak badan memandang bahwa

pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian dan arus kas. Target dan realisasi penerimaan pajak menurut Dirjen Pajak untuk beberapa tahun terakhir masih belum terealisasi. Berikut tabelnya dibawah ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Persentase
2017	Rp. 1.283,57 triliun	Rp. 1.151,03 triliun	89.6%
2018	Rp. 1.424,00 triliun	Rp. 1.315,15 triliun	92.3%
2019	Rp. 1.577,06 triliun	Rp. 1.450,00 triliun	91.9%
2020	Rp. 1.198,00 triliun	Rp. 1.069,00 triliun	89.2%

Sumber : Ditjen Pajak (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan pajak tidak terpenuhi sesuai dengan yang ditargetkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak terealisasi. Beban pajak yang tinggi sangat mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak dan bahkan menimbulkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari perbedaan kepentingan inilah memunculkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak, perusahaan akan melakukan *tax planning* yang tidak melanggar dari peraturan-peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak bisa memberikan hukuman kepada perusahaan yang telah melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah sebuah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak untuk badan maupun untuk pribadi yang merasa terbebani dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayar pajak dengan cara meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayar kan oleh waji pajak (Subekti, 2019).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bukanlah tanpa sengaja. Praktik penghindaran pajak juga bahkan sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan profit. Dari kebijakan pimpinan dan tujuan tersebut, strategi untuk melakukan penghindaran pajak yang merupakan bentuk efisiensi pembayaran pajak dilakukan pihak manajemen sebuah perusahaan dimana yang berkewajiban mengelola dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dibantu oleh beberapa staf pajak.

Pada tahun 2019 kementerian keuangan mengatakan bahwa perusahaan manufaktur mangalami penurunan terhadap setoran pajak ke kas negara, dimana di tahun tersebut realisasi penerimaan pajak sejumlah sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp. 365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8% dan jauh dari capaian tahun lalu yang mampu tumbuh sekitar 10,9%. Pada sektor ini yang menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4% (Sri Mulyani, 2019) menjabarkan tertekannya sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh sebesar 18,5%.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (dalam Saputra dan Asyik, 2017) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on entitas*. *Return on Entitas* (ROE) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROE yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROE dilihat dari laba bersih perusahaan dan equitas. Pengukuran kinerja dengan ROE menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROE adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Selain ROE, ada juga ROA, ROI yang digunakan dalam menghitung nilai profitabilitas, namun untuk penelitian ini peneliti hanya focus pada ROE saja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Primasri (2019) profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* hal ini dikarenakan semakin besar nilai profitabilitas dari sebuah perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan sehingga upaya untuk penghindaran pajak menjadi lebih besar.

Risiko perusahaan ialah cerminan dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan sehingga dapat memberikan indikasi karakter *risk taking* atau *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse* tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, insentif pajak akan meningkatkan kinerja eksekutif sehingga eksekutif akan termotivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan dan menghindari perilaku yang menyimpang salah satunya adalah menghindari tindakan penghindaran pajak. Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan diakibatkan karena ketidak pastian dimasa yang akan datang (Subekti, 2019).

Risiko perusahaan atau *corporate risk* termasuk kedalam cerminan atas kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan. Menurut Putra (2019) karakteristik pemimpin perusahaan yang memiliki sifat *risk taker* akan lebih berani dalam mengambil sebuah resiko walaupun keputusan yang diambil tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi. Selain itu, pemimpin dengan karakter *risk taker* juga tidak mudah ragu untuk melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk mengembangkan perusahaannya. Pemimpin *risk taker* umumnya akan menghindari membayar pajak, terutama dengan pajak besar perusahaan, sehingga perlu adanya *corporate risk* dalam penelitian ini.

Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan maka penting bagi perusahaan memiliki tata kelola yang baik. *Corporate governance* adalah sebuah alat yang digunakan untuk menegakkan prinsip pengendalian dan saling

mengawasi antara pemilik perusahaan dan agen. Penerapan *corporate governance* memiliki tujuan untuk meminimalkan konflik keagenan. Konflik keagenan akan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Peran *corporate governance* diharapkan mampu untuk mengendalikan munculnya atau timbulnya masalah yang terjadi. *Corporate governance* adalah sistem pengendalian internal pada perusahaan melalui kinerja manajemen sebagai pengelola perusahaan yang memiliki tujuan dalam mengurangi resiko dengan adanya konflik keagenan antar pemegang saham untuk memenuhi tujuan bersama dengan cara mengamankan asset perusahaan serta meningkatkan nilai investasi pemegang saham untuk jangka waktu yang panjang. Kepemilikan institusional merupakan proksi lain yang menunjukkan adanya *corporate governance*, kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham oleh pihak pemerintah, intitusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri atau bahkan institusi lainnya (Arry Eksandi, 2018).

Kepemilikan saham dari pihak institusional memiliki arti yang penting dalam memonitoring manajemen karena dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Pihak investor institusional akan melakukan usaha pengawasan yang lebih luas dan besar jika tingkat dari kepemilikan saham oleh pihak institusionalnya tinggi. Selain itu investor institusional juga menginginkan pengembalian sahamnya secara maksimal, sehingga akan ada tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak demi hasil yang maksimal.

Salah satu karakteristik dari *corporate governance* yang wajib dimiliki oleh perusahaan adalah komisaris independen. Komisaris independen juga memiliki fungsi untuk membantu dalam mengelola perusahaan dengan baik, melaksanakan pengawasan, dan membuat laporan keuangan perusahaan yang objektif. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis. Komisaris independen diyakini akan memberi pengawasan dalam suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang perpajakan. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sehingga dapat menjadi pihak untuk mengawasi dan memonitor tindakan manajemen yang oportunistik.

Perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi merupakan salah satu sektor dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki peluang tumbuh berkembang yang besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya permintaan pasar dalam sektor ekonomi sehingga dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat dan berkembang. Permintaan pasar yang besar mampu memberikan laba atau keuntungan yang besar pula bagi perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan yang memiliki keuntungan atau laba yang meningkat sehingga ada beberapa perusahaan yang berusaha untuk tetap mempertahankan perusahaan untuk tetap beroperasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu contoh adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi pada tahun 2016 dimana adanya praktek penghindaran pajak yang dilakukan

oleh perusahaan manufaktur PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Dalam menghindari kewajiban pajaknya pemilik perusahaan tidak memberikan dana sebagai modal perusahaan melainkan sebagai hutang yang mana nantinya pada saat bunga dibayarkan diakui sebagai dividen terhadap pemilik yang berada di Singapura.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Risk* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021?
2. Apakah *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021?

4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021?
5. Apakah profitabilitas, *corporate risk*, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021?

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan atas pembahasan yang dilakukan, maka perlu diadakan pembatasan masalah penelitian. Maka dari itu, peneliti mengambil fokus dalam penelitian ini pada variabel *corporate governance* dengan pengukuran yang meliputi kepemilikan institusional dan komisaris independen, selain itu peneliti mengambil fokus objek penelitian pada perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

2. Untuk mengetahui apakah *corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, *corporate risk*, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berarti dan bermanfaat sejalan dengan tujuan penelitian diatas. Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis (keilmuan) maupun praktis bagi siapapun.

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini sangat diharapkan untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan bahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya yang lebih meluas dan mendalam.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai mahasiswa jurusan Akuntansi, dapat memberikan manfaat untuk mengemban ilmu pengetahuan serta dapat menambahkan referensi secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dari pihak pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Serta diharapkan, terutama bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat menelaah kembali kebijakan perpajakan saat ini dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membayar kewajiban perpajakannya serta mengurangi adanya celah penghindaran pajak oleh perusahaan terutama pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan ini secara garis besar terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang tinjauan teori, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, pengolahan data, hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dari hasil penelitian yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Terjadinya hubungan keagenan (*Agency relationship*) yaitu ketika salah satu atau lebih individu disebut sebagai prinsipal menyewa organisasi maupun individu yang disebut sebagai agen melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat suatu keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dimana masing-masing akan mementingkan dirinya sendiri. Kunci dari teori keagenan sendiri adalah dapat dilihat dari perbedaan tujuan dari prinsipal dan agen, hal ini dapat menyebabkan asimetri informasi antara berbagai pihak karena pihak manajemen tentunya mendapatkan informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak eksternal (Lukviarnan, 2016).

Teori agensi memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa dalam setiap organisasi individu disebut dengan the agent akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau kelompok individu lainnya yang disebut dengan principal. Hubungan antara keduanya akan terjadi didalam sebuah organisasi atau perusahaan yang biasa digambarkan dengan hubungan antara pemegang saham (*stockholders*) sebagai principal dan manager atau pengelola sebagai agent. Para ahli teori agensi berpendapat bahwa baik principal maupun agent memiliki kepentingan masing-masing dan dari kepentingan tersebut sering

kali menimbulkan perbedaan sudut pandang antara keduanya (*divergence of interest*) (Lukviarnan, 2016). Selanjutnya menurut Jense dan Meckling dalam Hanny (2018) teori keagenan sebagai hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, dimana pemegang saham sebagai prinsipal memberikan kepercayaan (secara formal dalam bentuk kontrak hubungan kerja) kepada manajemen sebagai agen yang memberikan jasa manajerialnya.

Teori keagenan menghendaki adanya delegasi wewenang (secara keseluruhan atau sebagian) dari prinsipal kepada agen, dan prinsipal melakukan pengawasan terhadap kinerja agen melalui mekanisme pertanggungjawaban (Lukviarman, 2016). Sedangkan menurut Supriyono (2018) keperilakuan teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontrak agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberik kewenangan dalam pembuatan keputusan.

Menurut Putri (2017) teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadinya hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *corporate governance* yang memiliki tujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan teori agensi, yakni teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral memiliki tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan atau laba para pemilik, agen secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan

keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya atau bayarannya maka akan memperoleh kompensasi yang telah disesuaikan dengan kontrak.

Dalam teori agensi adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham disebabkan karena manajer lebih mengetahui kondisi internal di sebuah perusahaan dibandingkan pemegang saham. Manajer memiliki motivasi lebih untuk memenuhi kepentingannya sendiri hal ini berlaku dengan para pemegang saham yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan kemakmurannya, sehingga menyebabkan adanya *conflict of interest*, maka muncul *agency cost*.

Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Masalah tersebut disebut *agency conflict*. Konflik tersebut dapat terjadi pada saat proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh para manajer kurang dari 100% dari total saham yang beredar. Pada saat itu manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak berdasarkan pada tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dalam memilih dan mengambil kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingan agen, meskipun seringkali kebijakan tersebut bukan yang terbaik bagi prinsipal.

Permanasari (2015) menerangkan ada tiga asumsi sifat dasar manusia yang dapat digunakan untuk menjelaskan *agency theory*, yaitu:

1. Pada umumnya manusia mementingkan dirinya sendiri,
2. Daya pikir manusia memiliki keterbatasan terkait dengan persepsi masa depan,
3. Manusia selalu berusaha untuk menghindari risiko.

Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, dapat diketahui bahwa manajer sebagai seorang manusia kemungkinan besar akan melakukan tindakan-tindakan yang

sifatnya *opportunistic*, yaitu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. Sedangkan pemegang saham akan cenderung tertarik pada hasil keuangan yang terus mengalami pertumbuhan atau investasi mereka dalam perusahaan memberikan hasil yang baik.

Selain itu adanya masalah keagenan juga mengakibatkan perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Meckling (2014) menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis, antara lain:

1. Biaya Monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya Bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan principal, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen, bahwa principal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
3. Biaya Kerugian Residual (*residual loss*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal akibat dari perbedaan kepentingan.

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantaranya adanya kepemilikan saham oleh institusional dan kepemilikan saham oleh manajemen (Widiastuti, 2015). Kinerja yang dihasilkan oleh para pelaku perusahaan juga berpengaruh terhadap pemilihan auditor. Pemilik perusahaan akan membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitasnya kepada pemegang saham. Kinerja perusahaan yang buruk akan membuat pelaku perusahaan untuk memilih

auditor dengan kredibilitas yang rendah, sehingga akuntabilitas bisa dimanipulasi. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi *agency cost*, diantara adanya kepemilikan saham oleh 6 manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional (Haruman, 2015).

Konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan sering disebut dengan konflik keagenan. Menurut para pengambil keputusan risiko tersebut seharusnya ditanggung oleh para pemilik saham. Konflik keagenan dapat diminimumkan dengan mekanisme pengawasan sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Pengawasan yang dilaksanakan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang telah diberikan dan prinsip yang telah ditentukan (Kadarman, 2016).

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan dalam memahami *corporate governance*. Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Hanum, 2013). Anthony dan Govindarajan (2012) menyebutkan bila melihat teori agensi maka setiap individu akan bertindak untuk kepentingannya sendiri-sendiri, mengikuti sifat dasar manusia. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan suatu bentuk hubungan antara *principal* dan *agent*, yang didalamnya agent melakukan pelayanan bagi kepentingan *principal* dan pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari *principal* kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Adanya hubungan keagenan menjadi dasar dalam memahami *corporate*

governance. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Teori keagenan (*agency theory*) berasumsi bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Hal ini terjadi ketika agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) (Hamdani, 2016).

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri (Santoso dan Priatinah, 2016). Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasionalnya. Profitabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi investor (Ambarsari dan Hermanto, 2017).

Profitabilitas menurut Toto Prihadi (2019) adalah sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan perusahaan tergantung dari kebutuhan pengukuran laba tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan modal atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang didapatkan maka semakin baik pula kinerja perusahaan

tersebut di mata para investor sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik.

2.1.2.2 Tujuan Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016) tujuan profitabilitas bagi perusahaan dan bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode.
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan modal sendiri

Sedangkan menurut Hery (2016) tujuan profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode berlangsung.
3. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya.
4. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
5. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.

6. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.

2.1.2.3 Manfaat Profitabilitas

Manfaat yang diperoleh menurut Kasmir (2016) adalah:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Dan manfaat rasio profitabilitas menurut Hery (2016) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
2. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
3. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.
4. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
5. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

2.1.2.4 Jenis – Jenis Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Menurut (Hery, 2018) jenis-jenis profitabilitas yang biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba:

1. Hasil pengembalian atas asset (*Return on Assets*)

$$\text{Hasil Pengembalian Atas Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2. Hasil Pengembalian Atas Ekuitas (*Return on Equity*)

$$\text{Hasil Pengembalian Atas Ekuitas} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

$$\text{Margin Laba Operasi} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

$$\text{Margin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

5. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

$$\text{Margin Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Menurut Kasmir (2019) terdapat 4 (empat) jenis dari rasio profitabilitas, yaitu:

1. *Profit Margin (profit margin on sales)*

Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Penjualan bersih} - \textit{harga pokok penjualan}}{\textit{Sales}}$$

2. *Return on Investment (ROI)*

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama Return on Investment (ROI) atau Return on Total Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran rentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

$$\textit{Return on Investment} = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax}}{\textit{Total Aset}}$$

3. *Return on Equity (ROE)*

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

$$\textit{Return on Equity} = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax}}{\textit{Equity}}$$

4. *Laba per lembar saham.*

Rasio laba per saham biasa atau biasa disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Lembar saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

Menurut Sujarweni (2017) terdapat 7 (tujuh) jenis dari rasio profitabilitas, yaitu:

1. *Gross Profit Margin* (Marjin Laba kotor)

Gross Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. Return on Assets (ROA)

Return on Investment atau Return on Assets menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan

$$\text{Return on Investment/Assets} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. Return on Equity (ROE)

Return On Equity mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

5. Operating Profit Margin

Profit Margin digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi dengan total penjualan.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

6. Return on Investment (ROI)

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Netto sesudah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.1.3 Corporate Risk

2.1.3.1 Pengertian Corporate Risk

Corporate risk disebut juga dengan resiko bisnis. Resiko bisnis atau resiko perusahaan adalah cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse* (Oktamawati, 2019). Menurut Dewi dan Sari (2015) resiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan yang diakibatkan karena ketidakpastian dimasa yang akan datang.

Risiko bisnis dapat diartikan sebagai ketidakpastian pada perkiraan keuntungan atau kerugian dalam operasi sebuah perusahaan dimasa yang akan datang. Risiko bisnis sebuah perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Risiko bisnis yang tinggi pada sebuah perusahaan akan cenderung kurang dapat menggunakan utang dalam jumlah yang besar untuk pendanaan perusahaan, hal ini dikarenakan untuk menghindari tidak terbayarnya utang dimasa yang akan datang.

Menurut Yunita dan Tony Seno (2018) resiko bisnis adalah salah satu risiko aset perusahaan yang akan dihadapi jika sebuah perusahaan menggunakan utang yang terlalu besar akibat beban biaya pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai risiko bisnis dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis merupakan risiko dari perusahaan saat tidak mampu menutupi biaya operasionalnya yang sejalan dengan ketidakpastian tingkat pengembalian

atau laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax/EBIT*) atas total aktiva yang dimiliki perusahaan. Tinggi atau rendahnya risiko perusahaan dapat menentukan karakter eksekutif dalam perusahaan sehingga karakter tersebut memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan pembayaran pajak.

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi *Corporate Risk*

Terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap *corporate risk*. Menurut Brigham & Houston (Sawitri, 2015) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *corporate risk* yaitu:

1. Variabilitas permintaan

Makin stabil permintaan akan suatu produk pada perusahaan, maka apabila hal-hal lain dianggap konstan, akan makin rendah risiko usahanya.

2. Variabilitas harga jual

Perusahaan yang produknya dijual ke dalam pasar yang sangat labil akan menghadapi tingkat risiko usaha yang tinggi.

3. Variabilitas biaya masukan

Perusahaan yang biaya masukannya sangat tidak pasti akan menghadapi tingkat risiko usaha yang tinggi.

4. Kemampuan menyelesaikan harga keluaran terhadap biaya masukan

Beberapa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain untuk menaikkan harga keluarannya ketika biaya masukan meningkat. Semakin besar kemampuan untuk menyesuaikan harga keluaran untuk mencerminkan kondisi biaya, makin rendah tingkat risikonya.

5. Kemampuan untuk mengembangkan produk baru dengan cara yang tepat waktu dan efektif biaya

Perusahaan dalam industri yang berteknologi tinggi bergantung pada aliran konstan produk-produk baru. Semakin cepat produknya menjadi usang, maka semakin besar risiko usaha suatu perusahaan.

6. Pemaparan risiko luar negeri

Perusahaan yang sebagian besar labanya di luar negeri akan menjadi subjek dari penurunan laba akibat fluktuasi nilai tukar. Begitu pula dengan perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah dimana kondisi politiknya tidak stabil, perusahaan tersebut bisa jadi merupakan subyek dari risiko politik.

7. Sejauh mana tingkat biaya-biaya yang merupakan biaya tetap leverage operasi

Apabila sebagian besar biaya perusahaan merupakan biaya tetap, maka biaya tidak akan turun meski merosot, maka perusahaan tersebut menghadapi tingkat risiko usaha yang tinggi.

2.1.3.3 Pengukuran Nilai *Corporate Risk*

Risiko perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Palogorova dalam Sawitri 2015) :

$$\text{Corporate Risk} = \text{standar deviasi dari (EBITDA / Total Aset)}$$

Keterangan :

EBITDA = *Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*

2.1.4 *Corporate Governance*

2.1.4.1 *Pengertian Corporate Governance*

Dalam mengurangi permasalahan pada perusahaan maka diperlukan suatu tata kelola yang baik didalam perusahaan. Tata kelola (*corporate governance*) adalah suatu mekanisme atau alat yang digunakan untuk menegakkan prinsip pengendalian dan saling mengawasi antara pemilik perusahaan dan agen.

Corporate governance adalah mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan manajemen dan pemegang saham sehingga dapat meminimalkan perilaku manajemen yang berasal dari konflik kepentingan (Yuniarsih, 2018). Menurut Mulyani et al. (2018), *corporate governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Kehadiran suatu *corporate governance* yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. *Corporate governance* memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Peran lain ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Mulyani, 2018). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan

menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak. *Corporate governance* pada penelitian ini meliputi :

1. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan presentasi saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) namun tidak termasuk pada golongan kepemilikan insider atau manajeral. Keberadaan investor institusional dianggap mampu dalam menjadi mekanismen monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Pengawasan oleh investor institusional ini juga bertujuan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham (Hernawati, 2018). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawas yang intens. Kepemilikan institusional dapat memberikan tekanan yang cenderung pada manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Selain itu, kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Tingkat kepemilikan saham yang tinggi menyebabkan munculnya usaha investor institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih besar

terhadap pihak manajemen, sehingga dapat menghalau manajemen untuk berlaku *opportunistic*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi (Kadir, 2016). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemilikan institusional yang memantau secara profesional perkembangan investasinya akan mengakibatkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Komang, 2017). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara

manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional sebagai berikut (Permanasari, 2014):

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

2. Komisaris Independen

Menurut Mulyani (2018) salah satu permasalahan dalam penerapan *corporate governance* adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Oleh karena itu diperlukannya komisaris independen (*independent commissioner*) yang memiliki fungsi sebagai kekuatan dalam menyeimbangkan (*controveiling power*). Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar

perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan.

Komisaris adalah anggota komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan yang mampu mempengaruhi kemampuan dengan bertindak independen. Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran hingga kesetaraan antara kepentingan pemegang saham hingga *stakholder* lainnya (Anggodo, et al. 2017). Pada penelitian yang dilakukan Ayu et al (2015) menyatakan bahwa pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), presentase jumlah dari komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Dan dapat dikatakan bahwa komisaris independen mempresentasikan kepentingan para pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik. Komisaris independen Komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak boleh mempunyai koneksi pribadi dengan pemegang saham utama ataupun jajaran direksi yang lain.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham Perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016).

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015).

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut Pasaribu (2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau *agency conflict* (Luciana, 2016).

4. Komite Audit

Komite audit memiliki peran atau tugas yang penting di dalam perusahaan. Peran komite audit adalah memeriksa dan mengawasi seluruh aktivitas pada saat proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dalam perusahaan. Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI sekurang-kurangnya harus memiliki 3 orang yang tergabung dalam komite audit. (Sarra et al. 2014) dalam penelitiannya mengukur variabel komite audit dengan menghiung jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan.

Komite audit merupakan orang yangnng melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, tetapi mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi intergritasnya. Hal ini perlu didasari

karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016).

5. Kualitas Audit

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017) kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Berdasarkan (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari :

a. Standar Umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya profesionalnya cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
- c) Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

2.1.4.2 Prinsip Tata Kelola *Corporate Governance*

Pentingnya prinsip tata kelola atau disebut juga *corporate governance* agar dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan didalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam prinsipnya terdapat lima prinsip *corporate governance* yang

telah disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang terdiri dari yaitu :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Saat ini setiap perusahaan dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang lengkap dan mudah untuk diakses oleh berbagai kalangan untuk meningkatkan performa perusahaan. Informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentu dapat memudahkan para pemegang saham untuk menentukan arah kebijakan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan dalam pengambilan keputusan juga dilandasi oleh laporan keuangan. Dengan kata lain adalah keterbukaan atau *transparency* mengenai informasi perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dapat diartikan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban pada elemen perusahaan. Jika prinsip ini dilakukan maka akan ada kejelasan antara hak dan kewajiban, serta wewenang antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan auditor organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Responsibilitas (*Responcibility*)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif dari pemegang saham, dewan komisaris dan auditor. Tanggung jawab tentu sangat penting karena perusahaan harus mampu untuk mempertanggung jawabkan segala kinerja yang telah dilakukan. Hal ini tidak lain untuk tercapainya tujuan perusahaan. Bentuk dari tanggung jawab ini adalah

kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku diperusahaan serta berusaha untuk menaatinya.

4. Kemandirian (*Independency*)

Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan harus dikelola dengan profesional tanpa ada kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Kesenjangan (*Fairness*)

Pada prinsip ini menandakan bahwa harus ada keadilan dalam pemenuhan hak antara pemegang saham minoritas maupun pemegang saham yang mayoritas dengan memperhatikan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam prinsip ini dilakukan agar dapat melindungi semua elemen yang ada didalam perusahaan.

2.1.4.3 Tujuan *Corporate Governance*

Tujuan dari *corporate governance* atau tata kelola adalah agar kinerja dari perusahaan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan bersama dan menghindari kecurangan dalam manajemen perusahaan serta dapat membuat laporan keuangan yang dinilai akuntabel bagi para pengguna laporan keuangan. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang akuntabel maka pengambilan sebuah keputusan yang ada pada struktur dengan tujuan mengatur pola hubungan antara pemegang saham. Dewan komisaris dan dean direksi (Ningsih & Mildawati, 2017).

Corporate governance sebagai tata kelola perusahaan dapat menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin. Keputusan dari pimpinan

perusahaan dapat mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan termasuk dalam penghindaran pajak .

2.1.4.4 Pengukuran *Corporate Governance*

Dalam penelitian ini pengukuran nilai *Corporate Governance* digunakan dua proksi yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen.

1. Kepemilikan Institusional

Besarnya tingkat kepemilikan saham pihak institusional tentu akan menentukan besarnya tingkat pengawasan terhadap pihak manajemen.

Kepemilikan institusional menurut Mei Yuniati dan Kharis Raharjo (2016) dengan rumus sebagai berikut :

$$KI = (\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional} / \text{jumlah Saham Yang Beredar}) \times 100\%$$

Kepemilikan institusional menjadi penyedia dana yang digunakan untuk modal perusahaan, mempunyai klasifikasi tertentu dalam menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Untuk mendapatkan kepercayaan institusi, maka perusahaan harus menyediakan informasi yang handal dan relevan kepada pihak institusi melalui laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan yang terjamin dapat mempengaruhi laba.

2. Komisaris Independen

Secara sistematis, menurut Muh Arief Effendi (2016) rumus Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

$$KI = \text{Jumlah Anggota Komisaris Independen} / \text{Jumlah semua Anggota Dewan Komisaris} \times 100\%$$

Keberadaan Komisaris Independen di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor : KEP-

315/bej/06-2000 perihal Peraturan No I-A, tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan tercatat pada butir mengenai tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, menyebutkan tentang rasio Komisaris Independen yaitu perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.

2.1.5 Tax Avoidance

2.1.5.1 Pengertian Tax Avoidance

Segala upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya ialah *tax planning* atau perencanaan pajak. Praktik perencanaan pajak dapat mengarah pada pengurangan kewajiban pajak, tergantung pada intensitas dan legalitas dalam bagaimana praktik-praktik ini diadopsi. Praktik perencanaan pajak dapat berupa praktik yang masih berada pada hukum yang jelas-jelas legal, meragukan secara hukum atau berada pada skala abu-abu, atau berada pada illegal dan benar-benar curang (Martinez, 2017). *Tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terjadi secara kebetulan, namun telah diatur dalam strategi yang telah ditetapkan (Mulyani, 2018).

Menurut Martinez (2017) penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada umumnya dipandang bermanfaat bagi perusahaan dan pemegang saham selama perencanaan biaya pajak menyiratkan arus kas dan laba bersih lebih tinggi untuk perusahaan. Menurut Pohan (2018) *tax avoidance* dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan cara menghindari pajak secara legal dan aman karena hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pajak.

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan.

2.1.5.2 Karakter – Karakter *Tax Avoidance*

Menurut Fadhilah (2014) terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) :

1. Terdapat unsur artificial

Terdapat unsur artificial dimana peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Memanfaatkan *loopholes*

Menurut Fadhilah (2014) selain unsur artificial ada juga karakter dalam penghindaran pajak, yaitu memanfaatkan *loopholes*.

Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang dan menjalankan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal yang dimaksud oleh pembuat undang-undang tidak seperti itu.

3. Konsultan

Konsultan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mampu menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991).

2.1.5.3 Pengukuran Nilai *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Hanlon dan Heitzmen, 2015) :

$$\text{Cash ETR} = \text{Pembayaran Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Adanya pengaruh positif dari variabel profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hal ini dasari oleh penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2018), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian tersebut dalam penelitiannya membuktikan bahwa pembayar pajak tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah, hal ini dikarenakan ROA dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan usaha. Profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.

2.2.2 Pengaruh *Corporate Risk* Terhadap *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijak-kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau eksekutif didalam perusahaan itu

sendiri. Dimana pimpinan perusahaan tersebut sebagai pengambil keputusan dan kebijakan terhadap perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa menjadi *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Chasbiandani, 2019). Dalam teori agensi kepentingan ini bisa jadi akan menimbulkan *agency problem* kedepannya apabila terjadi asimetri informasi antara principal dan agent mengenai kebijakan yang diambil terkait dengan risiko perusahaan.

Pemimpin didalam perusahaan tentu memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan yang ada dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Suryadi dan Afridayani (2021) menyebutkan bahwa Risiko perusahaan atau *corporate risk* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan dapat memberikan pengaruh terhadap risiko perusahaan.

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Besarnya tingkat kepemilikan saham pihak institusional tentu akan menentukan besarnya tingkat pengawasan terhadap pihak manajemen. Di dalam teori agensi disebutkan hubungan antara pemilik saham dan manajemen maka semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusional secara otomatis akan membuat pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen didalam sebuah perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam perusahaan. Dalam teori agensi dengan tingginya kepemilikan saham oleh pihak institusional, maka dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent. Sehingga masalah keagenan dapat dikurangi. Pengawasan yang tinggi tentu

akan mengurangi perilaku *opportunistic* dari pihak manajemen. Sehingga diharapkan pengawasan tersebut mampu mencegah pihak manajemen untuk membuat keputusan terkait penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Mita Dewi (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan memastikan bahwa *corporate governance* sudah dilakukan di dalam perusahaan. Teori agensi menyebutkan bahwa salah satu cara mengurangi asimetri informasi adalah dengan membentuk dewan komisaris yang merupakan perpanjangan tangan dari pemilik saham. Komisaris independen berasal dari kalangan luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama, jajaran direksi dan dewan komisaris lainnya. Maka dari itu komisaris independen memiliki peran yang penting untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mampu mendeteksi perilaku penyimpangan atau kecurangan. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka diharapkan komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Mita Dewi (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menyatakan bahwa komisaris independen juga dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada sebuah perusahaan.

2.2.5 Pengaruh Profitabilitas, *Corporate Risk*, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan praktik penghindaran pajak yang dianggap sah dimata hukum, yaitu mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah serta tidak melanggar hukum. Banyaknya perusahaan yang mencoba melakukan *tax avoidance* dengan berbagai alasan, salah satunya adalah ketika menurunnya profitabilitas sebuah perusahaan maka perusahaan akan melakukan *tax avoidance* agar dapat menyelamatkan perusahaan.

Profitabilitas, Kepemilikan Institusional berpengaruh positif Terhadap *Tax Avoidance* dalam penelitian Gelia A.P (2023). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Dana Saputra (2019) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *corporate governance* secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*.

Selain itu, *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh *corporate risk*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Kemala Ratu (2021) yang menyatakan bahwa pada hasil penelitian diperoleh salah satu pendukung terjadinya *tax avoidance* adalah *corporate risk*. Hal ini dibuktikan pada variabel *corporate risk*, ditemukan nilai signifikansi t sebesar -0.048 yang diprosikan dari standar deviasi EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan. Dengan signifikannya nilai risiko perusahaan, hal tersebut menandakan bahwa memang risiko perusahaan berperan penting dalam praktik *tax avoidance*.

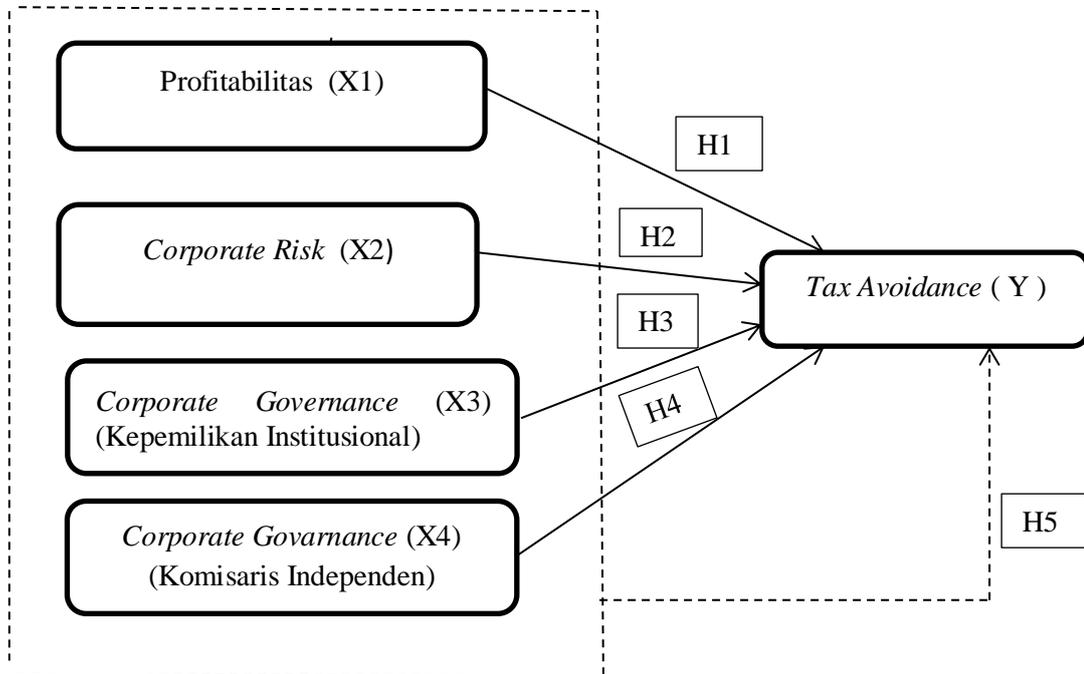
Kepemilikan institusional, komisaris serta komite audit juga mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini didukung oleh penelitian Pratomo dan Rana (2021) dimana hasil pengujian analisis menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif. Sugiyono (2017) juga mengungkapkan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bagan alur untuk menghubungkan variable independent (profitabilitas, *corporate risk*, kepemilikan institusional dan komisaris independen) dengan variable dependent (*tax avoidance*), sehingga menghasilkan hipotesis yang dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Selain ini dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pengaruh secara parsial (masing-masing) serta pengaruh secara simultan (bersama-sama). Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah untuk penelitian (2022)

Ket :

- = Pengaruh Secara Parsial
 - - - - -> = Pengaruh Secara Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2017). Dengan mengacu pada rumusan masalah landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

- H1 : Diduga ada pengaruh positif profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*
 H2 : Diduga ada pengaruh positif *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*
 H3 : Diduga ada pengaruh positif Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

H4 : Diduga ada pengaruh positif Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

H5 : Diduga ada pengaruh Profitabilitas, *Corporate Risk*, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Pada penelitian Gelia Ayu Prameiswari (2023) dengan judul penelitian pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2017-2020). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh antara profitabilitas, *capital intensity*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sample dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2020. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif dengan mengolah data sekunder yang diperoleh di BEI. Jumlah sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *capital intensity*,

kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena tidak semua komisaris independen dapat menunjukkan independensinya

2. Pada penelitian Mutiara Kemala Ratu (2021) dengan judul penelitian analisis *corporation social responsibility*, *corporate risk*, *capital intensity* dan *profitability* terhadap *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *corporation social responsibility*, *corporate risk*, *capital intensity* dan *profitability* terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini data dan sampel yang digunakan merupakan perusahaan yang terdaftar di BEI (*Indonesia Stock Exchange*) tahun 2013-2015 . Teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling dalam tujuan mendapatkan sampel berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang dimaksudkan untuk dipenuhi oleh sampel adalah (1) perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI dengan laporan keuangan yang lengkap tahun 2013-2015 berturut-turut; dan (2) perusahaan yang melakukan CSR dan di ungkapkan di laporan keuangan tahun 2013-2015 berturut-turut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate risk* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Pada penelitian Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) dengan judul penelitian pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemilikan institusional,

komisaris independen serta komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan total sampel yang didapatkan sebanyak 14 perusahaan dalam waktu 4 tahun sehingga diperoleh 56 sampel setelah dilakukan data outlier. Analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan software *Eviews 10*. Hasil pengujian analisis menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan. Pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Pada penelitian Suropto dan Novitaria (2021) dengan judul penelitian *influence of tunneling incentive, risk management and company characteristic on tax avoidance with corporate social responsibility disclosure as moderating variabel in mining companies list on IDX*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi bukti empiris mengenai pengaruh penerapan insentif *tunneling*, manajemen risiko, dan karakter perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dan CSR sebagai variabel moderator. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga

diperoleh sebanyak 8 perusahaan dengan 40 data observasi. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif *tunneling* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Manajemen risiko dan *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Untuk *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. Pada penelitian Yuqiang Cao, *et.al* (2021) dengan judul penelitian *tax avoidance and firm risk : evidence from China*. Pada literatur sebelumnya mendokumentasikan bukti yang membingungkan dimana adanya pengungkapan bahwa aktivitas penghindaran pajak tidak mempengaruhi risiko perusahaan. Dengan menggunakan sampel AS yang diperluas, kami menemukan bahwa tarif pajak efektif tunai (ETR) yang lebih rendah dikaitkan dengan volatilitas yang lebih tinggi, serta adanya pengembalian pajak melalui jual beli. Berdasarkan hasil analisis kami terhadap perusahaan China menunjukkan bahwa perusahaan milik negara (BUMN) China dengan kas lebih rendah dan GAAP ETR cenderung memiliki risiko perusahaan yang lebih rendah. Selain itu, kami menggunakan pendekatan yang berbeda sebagai pembeda variabel berdasarkan variasi yang dihasilkan oleh dua peraturan penghindaran pajak eksogen di Cina tetapi tidak menemukan bukti yang menunjukkan hubungan kausal antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan. Secara keseluruhan, hasil analisis penelitian

kami menunjukkan bahwa hubungan antara penghindaran pajak dan risiko bervariasi di seluruh negara, periode sampel dan tindakan agresivitas pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018) jenis data terbagi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hasil dari penelitian langsung yang didapat dari hasil wawancara kepada narasumber. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu laporan tahunan perusahaan yang tercatat pada periode 2017-2021. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs www.idx.co.id, untuk mendapatkan data profitabilitas, *corporate risk*, dan *corporate governance* serta *tax avoidance*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018) adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data yang diinginkan. Pada penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data yang diambil penulis dalam metode kepastakaan ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, buku-buku literar dan penelitian sejenisnya.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2017) metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berisi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga dapat dikatakan kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada. Pada penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan mengambil data laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id untuk periode 2017-2021.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Silaen (2018) populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti. Populasi juga disebut universe (*universe*) yang berarti keseluruhan, dapat berupa benda hidup atau benda mati. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melampirkan laporan keuangan dari tahun 2017-2021. Jumlah perusahaan yang terdaftar yaitu 60 perusahaan. Berikut tabel populasi dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021:

Tabel 3.1
Jumlah Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Sektor Industri
Barang Konsumsi Tahun 2017-2021

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten
1.	PT. Akasha Wira International Tbk.	ADES
2.	PT. Tiga Pilar Sejahtera Foo Tbk.	AISA
3.	PT. Tri Banyan Tirta Tbk.	ALTO
4.	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk.	BTEK
5.	PT. Budi Starch & Weetener Tbk.	BUDI
6.	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.	CAMP
7.	PT. Wilmar Cahaya Tbk.	CEKA
8.	PT. Sariguna Primatirta Tbk.	CLEO
9.	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk.	COCO
10.	PT. Delta Djakarta Tbk.	DLTA
11.	PT. Diamond Food Indonesia Tbk.	DMND
12.	PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk.	ENZO
13.	PT. Sentra Food Indonesia Tbk.	FOOD
14.	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	GOOD
15.	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk.	HOKI
16.	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk.	ICBP
17.	PT. Inti Agri Resources Tbk.	IIKP
18.	PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk.	IKAN
19.	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF
20.	PT. Magna Investama Mandiri Tbk.	MGNA

21.	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk.	MLBI
22.	PT. Mayora Indah Tbk.	MYOR
23.	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.	PANI
24.	PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk.	PCAR
25.	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk.	PSDN
26.	PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk.	ROTI
27.	PT. Sekar Bumi Tbk.	SKBM
28.	PT. Sekar Laut Tbk.	SKLT
29.	PT. Siantar Top Tbk.	STTP
30.	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.	ULTJ
31.	PT. Gudang Garam Tbk.	GGRM
32.	PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk.	HMSP
33.	PT. Bantoel International Investoma Tbk.	RMBA
34.	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk.	WIIM
35.	PT. Darya Varia Laboratoria Tbk.	DVLA
36.	PT. Indofarma Tbk.	INAF
37.	PT. Kimia Farma Tbk.	KAEF
38.	PT. Kalbe Farma Tbk.	KLBF
39.	PT. Merck Indonesia Tbk.	MERK
40.	PT. Phapros Tbk.	PEHA
41.	PT. Pyridam Farma Tbk.	PYFA
42.	PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.	SCPI
43.	PT. Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk.	SIDO
44.	PT. Soho Global Health Tbk.	SOHO
45.	PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.	SQBB
46.	PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.	SQBI
47.	PT. Tempo Scan Pasific Tbk.	TSPC
48.	PT. Kino Indonesia Tbk.	KINO
49.	PT. Cottonindo Ariesta Tbk.	KPAS
50.	PT. Martina Berto Tbk.	MBTO
51.	PT. Mustika Ratu Tbk.	MRAT
52.	PT. Mandom Indonesia Tbk.	TCID
53.	PT. Unilever Indonesia Tbk.	UNVR
54.	PT. Cahaya Bintang Medan Tbk.	CBMF
55.	PT. Chitose International Tbk.	CINT
56.	PT. Kedaung Indah Can Tbk.	KICI
57.	PT. Langgeng Makmur Industry Tbk.	LMPI
58.	PT. Boston Furniture Industries Tbk.	SOFA
59.	PT. Integra Indocabinet Tbk.	WOOD
60.	PT. Hartadinata Abadi Tbk.	HRTA

Sumber : www.idx.co.id (2022)

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2018). Teknik *purposive sampling* diterapkan karena peneliti memiliki kriteria sampel tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Kriteria pengambilan sampel sebagai berikut (Saputra, 2018):

- a. Perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 2017-2021.
- b. Perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut (2017-2021).
- c. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data seperti profil perusahaan yang diperlukan untuk penelitian selama periode 2017-2021.

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan terdapat 22 sampel perusahaan. Berikut adalah penentuan sampel yang dilakukan :

Tabel 3.2
Proses Penentuan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021	60
Jumlah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak menerbitkan laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut (2017-2021).	(25)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk penelitian selama periode 2017-2021.	(13)
Jumlah sampel penelitian	22
Jumlah data penelitian dari tahun 2017-2021 = 22 x 5 tahun	110

Sumber : Data diolah (2022)

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2019) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Bebas (*Independen*)

Menurut Sugiyono, (2019) variabel *independen* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen*. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel *independen*

adalah profitabilitas (X1), *corporate risk* (X2) dan *corporate governance* (X3).

2. Variabel terikat (*Dependen*)

Variabel dependen menurut Sugiyono, (2019) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel *dependen* adalah *tax avoidance* (Y).

3.5.2 Definisi Variabel

1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 2019). Variabel profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang digunakan oleh Kasmir (2018) yaitu dengan rumus ROE sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

2. *Corporate Risk*

Menurut Dewi dan Sari (2015) resiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan yang diakibatkan karena ketidakpastian dimasa yang akan datang. Risiko perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Palogorova, 2010) :

$\text{Corporate Risk} = \text{standar deviasi dari (EBITDA / Total Aset)}$

EBITDA = *Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*

3. Kepemilikan Institusional

Menurut Pasaribu & Sulasmiyati (2016) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan. Kepemilikan institusional adalah alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase. Menurut Mei Yuniati dan Kharis Raharjo (2016) kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai

$$KI = (\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Institusional} / \text{Jumlah Saham Yang Beredar}) \times 100\%$$

4. Komisaris Independen

Komisaris independen diukur sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2016). Jumlah anggota dewan komisaris dan komisaris independen dapat dilihat pada Laporan Keuangan yang telah diaudit bagian Informasi Umum Perusahaan atau di Laporan Tahunan perusahaan pada bagian Tata Kelola Perusahaan bagian struktur dewan komisaris. Secara sistematis menurut Muh Arief Effendi (2016) mengemukakan rumus Komisaris Independen sebagai berikut:

$$KI = \text{Jumlah Anggota Komisaris Independen} / \text{Jumlah semua Anggota Dewan Komisaris} \times 100\%$$

5. *Tax Avoidance*

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi dibidang perpajakan. Penghindaran pajak adalah

salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan. *Tax Avoidance* dapat diukur dengan berbagai pendekatan salah satunya *Cash ETR*. Menurut (Hanlon dan Heitzmen, 2015) diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \text{Pembayaran Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Rumus
1.	Profitabilitas (X1)	Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 2019).	$ROE = \text{Earning After Interest and Tax} / \text{Equity}$
2.	<i>Corporate Risk</i> (X2)	Menurut Dewi dan Sari (2015) resiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang diharapkan yang diakibatkan karena ketidakpastian dimasa yang akan datang.	CR = standar deviasi dari (EBITDA/Total Aset)
3.	<i>Corporate Governance</i> Kepemilikan institusional (X3)	Menurut Pasaribu & Sulasmiyati (2016) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi atau perusahaan. Kepemilikan institusional adalah alat yang dapat digunakan untuk mengurangi	KI = (Jumlah saham yang dimiliki institusional / jumlah saham yang beredar) X100%

	Komisaris Independen (X4)	<p>konflik kepentingan dalam suatu perusahaan.</p> <p>Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan.</p>	$KI = (\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen} / \text{Jumlah semua Anggota Dewan Komisaris}) \times 100\%$
4.	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Menurut Pohan (2018) <i>tax avoidance</i> dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan cara menghindari pajak secara legal dan aman karena hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pajak.	$\text{Cash ETR} = \text{Pembayaran Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2022)

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) menurut Sugiyono (2019) data sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data melainkan harus mencari terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Data sekunder disini menggunakan data rutut waktu (*time series*) atau disebut juga data tahunan dan data antar ruang (*cross section*). Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017 sampai 2021. Data tersebut diperoleh dari melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di <http://www.idx.co.id>. Selain itu juga dilakukan

penelusuran berbagai jurnal, karya ilmiah, artikel, dan berbagai buku referensi sebagai sumber data dan acuan dalam penelitian ini.

3.6.1 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah telah terkumpul secara lengkap. Menurut Sugiyono (2018) teknik analisis data berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi *E Views* versi 10.

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtois dan skewness (kemencengan distribusi).

3.6.3 Penentuan Model Data

Penentuan model bertujuan untuk menentukan uji yang sesuai dengan model data yang ada. Menurut Widarjono (2018) terdapat 3 model uji data panel yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier dan hasil pengujian kemudian digunakan untuk menentukan penggunaan metode analisis yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Untuk menentukan model yang tepat maka dilakukan pengujian sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan apakah *common effect* model atau *fixed effect* yang lebih tepat untuk digunakan dalam statistika.

Hipotesis dalam uji chow sebagai berikut:

H0: Menggunakan model *Common Effect* (CE)

H1: Menggunakan model *Fixed Effect* (FE)

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (0.05) maka model penelitian yang lebih tepat menggunakan model FE.

2. Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian untuk menentukan apakah model RE atau FE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut :

H0: Menggunakan model RE

H1: Menggunakan model FE

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (0.05) maka model penelitian yang lebih tepat menggunakan model FE.

3. Uji Lagrange

Multiplier Uji lagrange multiplier (LM) adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah model CE atau RE yang lebih tepat untuk digunakan. Hipotesis dalam uji LM sebagai berikut:

H0: Menggunakan model CE

H1: Menggunakan model RE

Untuk menentukan hipotesis mana yang diterima, maka dilihat nilai probabilitas *both breusch-pagan*. Apabila nilai *both breusch-pagan* lebih kecil dari alpha 0.05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model RE atau menolak H0. Apabila nilai *both breusch-pagan* lebih besar dari alpha 0.05 maka regresi model lebih tepat menggunakan model CE (*Common Effect*) atau menolak H1.

Menurut Widarjono (2018), untuk mengestimasi pemilihan model dengan data panel terdapat tiga pendekatan (model) yang akan dipilih, yaitu:

1. *Model Common Effect*

Model yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Menurut Widarjono (2018), dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu.

2. *Model Fixed Effect*

Model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, model ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3. *Model Random Effect*

Model yang digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami

ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode RE menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu. Sehingga dalam model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section*, dan residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke-*i* dan tetap sepanjang waktu.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis atau tidak, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolinieritas.

3.6.4.1 Uji Normalitas

Menurut Winarno (2017), untuk pengujian lebih akurat diperlukan analisis dan *E-Views* menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-bera. Disini metode yang digunakan yaitu Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Pada angka Jarque-bera diatas sebesar 0,05 (>5%), maka data berdistribusi normal.

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka

multikolonieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana Winarno (2017). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat hasil koefisien korelasi antar variabel independen. Koefisien korelasi yang tinggi mengindikasikan adanya Multikolinieritas Widarjono (2017). Jika pada matriks terdapat nilai $> 0,90$ maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga tidak ada multikolinieritas dalam model.

3.6.4.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat gejala heteroskedastisitas atau tidak terjadi di dalam model regresi. Dalam uji ini syaratnya dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai prob. $> 0,05$. Maka hal tersebut menunjukkan data terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

3.6.5 Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel *independen*. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh profitabilitas, *corporate risk*, kepemilikan

institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b1.x1 + b2.x2 + b3.x3 + b4.x4$$

Keterangan :

Y	= <i>Tax Avoidance</i>
α	= Konstanta
$\beta1 - \beta4$	= Koefisien regresi
X1	= Profitabilitas
X2	= <i>Corporate Risk</i>
X3	= Kepemilikan Institusional
X4	= Komisaris Independen

3.6.6 Uji Hipotesis

Menurut Ghozali, (2018) ketetapan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai *actual* dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistic t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya, suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistic apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). H_0 yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah diman H_0 diterima.

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika hasil perhitungan nilai signifikan $< \alpha$ 5% menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel dependen. Penerimaan dan penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai $\text{prob.} \leq \alpha (0.05)$, maka hipotesis diterima.
2. Jika nilai $\text{prob.} \geq \alpha (0.05)$, maka hipotesis ditolak.

2. Uji Simultan (Uji-f)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak Ghozali (2018). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

- a. Jika probabilitas < taraf signifikansi 5% = 0,05, maka H_a diterima yaitu insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan intusional dan komisaris independen secara bersamaan/simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).
- b. Jika probabilitas > taraf signifikansi 5% = 0,05, maka H_0 diterima insentif eksekutif, *corporate risk*, kepemilikan institusional dan komisaris independen secara bersamaan/simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR).

3. Uji Determiniasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dipenden. Besarnya koefisien determinasi ini adalah nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti determinasi ini adalah nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Apabila koefisien determinasi (R^2) berarti tidak ada hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya untuk koefisien determinasi (R^2) = 1 maka terdapat hubungan yang sempurna. Digunakan *adjusted* R^2 sebagai koefisien determinasi apabila variabel bebas lebih dari dua.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2016). Metodologi Penelitian. PT Bumi Aksara.
- Alviyani, Khourinnisa. 2016. Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014). JOM Fekon Vol. 3 No.1 Februari 2016 ISSN: 2540-2554.
- Amelia, W., & Hernawati, E. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. NeO~Bis, 63.
- Andriani Monica Subekti. 2019. Pengaruh *Corporate Governance* dan Insentif Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2009-2018). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*. Universitas Muhammadiyah Magelang. P-ISSN : 2662-9404.
- Ardianti, N. W. (2020.). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Komite Audit pada *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi., 30(10), 2591-2603
- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, Alan D. Jagolinzer, and David F. Larcker. 2015. “*Corporate Governance, Incentives, and Tax avoidance.*” *Journal of Accounting and Economics*.
- Atari, Jeane et al. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive. Jurnal. JOM Fekom, Vol.3 No.1 (Februari).
- Ayu, et al. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 183, 2028–2054.
- Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah (JAK)*. Vol 8 No.1. Universitas Telkom Indonesia.
- Fahmi, Irham. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali dan Ratmono. 2017. Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan E-Views 10. Universitas Diponegoro. Semarang

- Kasmir. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan Delapan. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Lukviarnan, N. 2016. *Corporatae Governance*. PT. Era Adicitra Intermedia, ed. Solo.
- Mutiara Kemala Ratu (2021). *Corporation Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity dan Profitability Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini. Vol 12 No. 02. Universitas Indo Global Mandiri.
- Nuryanto dan Zulfikar. 2018. *Eviews Untuk Analisis Ekonometri Dasar Aplikasi dan Interpretasi*. UNIMMA. Magelang
- Suripto dan Novitaria (2021). *Influence of Tunneling Incentive, Risk Management and Company Characteristic On Tax Avindance With Corporate Sosial Responsibility Disclosure Asa Moderating Variabel in Mining Companies List on IDX. International Journal of Social Science and Business*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Saputra A.D. (2018). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi UII*.
- Suandy, Erly. 2017. Perencanaan Pajak. Salemba Empat. Jakarta
- Subekti. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2009-2018). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanto, Azhar. 2017. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- Turner, Leslie, Andrea Weickgenannt, dan Mary Kay Copeland. 2017. *Accounting Information Systems : Controls and Processes*.
- Yuqiang Cao. 2021. *Tax Avoidance and Firm Risk : Evidence From China*.

Journal Accounting and Finance. University of Waikato.

Lampiran 4

CURRICULUM VITAE



Nama : Noormarita
Tempat/Tanggal Lahir : Kijang /26 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Nomor HP : 0812-9317-9474
Email : noormarita1@gmail.com
Alamat : Jl. Nusantara Km. 17 Kijang
Nama Orangtua : Bapak Thamrin
Ibu Rosnah
Riwayat Pendidikan : SD 009 Bintan Timur
SMPN 7 Tanjungpinang
SMK N 4 Tanjungpinang
STIE Pembangunan Tanjungpinang